

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris, mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Sektor ini memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena masih menjadi pilar utama perekonomian sekaligus penyedia kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan.¹ Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,1 persen rumah tangga miskin bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan mereka. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga miskin berada di wilayah pedesaan, di mana tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.²

Pada tahun 2022 luas lahan pertanian di Indonesia tercatat mencapai sekitar 7,46 juta Ha. Namun demikian, luas lahan tersebut mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan serta tekanan dari aktivitas pembangunan. Sementara itu, pada Maret 2023 sekitar 62,75% dari total penduduk miskin di Indonesia berdomisili di wilayah pedesaan, dengan sebagian besar bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan.³ Sebagai Negara dengan wilayah yang luas dan potensi lahan pertanian yang cukup besar, idealnya masyarakat pedesaan dapat hidup dengan sejahtera. Namun, kenyataannya masih jauh dari harapan, karena banyak petani di pedesaan yang masih hidup dalam kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith dalam Yarlina Yacoub sebagian besar individu miskin tinggal di daerah pedesaan dengan sektor pertanian

¹ Udin Saripudin, “Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf”, (Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2021), h. 1.

² Kuni Nasihatun Arifah, dkk, “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Petani di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Pertanian”, *Jurnal Jatijajar Law Review* Vol. 2 No. 1, 2023, h. 98.

³ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Statistik Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian Tahun 2023*, (Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023), h. 12.

sebagai kegiatan utama mereka. Sebanyak dua pertiga dari populasi miskin bergantung pada pertanian subsisten yaitu sistem pertanian yang hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya, tanpa banyak kelebihan hasil panen untuk dijual. Pola ini umumnya dijalankan oleh petani kecil maupun buruh tani dengan upah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pertanian subsisten menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di pedesaan.⁴

Langkah strategi untuk mengurangi kemiskinan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok sering menjadi akar masalah. Selain itu, baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah juga memprioritaskan upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat miskin, termasuk melalui sektor pertanian. Program pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian, seperti pelatihan teknis, penyediaan bibit unggul, akses permodalan, dan pengembangan pasar, diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan sosial. Kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat pedesaan meningkatkan produktivitas tetapi juga menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan.⁵

Meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkuat kondisi perekonomian menjadikan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai hal yang penting dilakukan. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan berbagai model pembangunan ekonomi yang tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha untuk

⁴ Yarlina Yacoub, dkk, "Analisis Kesejahteraan Petani dan Kemiskinan Pedesaan Di Indonesia", *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2020 ISBN: 978-602-53460-5-7, h. 92.

⁵ Ratnia Solihah, dkk, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Vol. 11, No. 3, 2022, h. 184.

meningkatkan kesejahteraan dengan mendorong kemandirian agar dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Proses ini melibatkan pemberian kekuatan kepada mereka yang kurang berdaya serta mengembangkan potensi yang sudah ada sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.⁶

Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi di Pulau Jawa juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Wilayahnya didominasi oleh kawasan pedesaan dengan lahan subur yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota. Menurut data BPS, luas lahan pertanian di Provinsi Banten pada tahun 2022 mencapai 204,196 Ha dengan Kabupaten Pandeglang sebagai penyumbang lahan pertanian terbesar.⁷ Di Pandeglang sendiri, luas lahan pertanian mencapai 104,537 Ha yang meliputi sawah irigasi, tadah hujan, dan perkebunan rakyat.⁸ Meskipun demikian, tantangan seperti minimnya teknologi, keterbatasan modal, dan rendahnya produktivitas masih menjadi persoalan utama di wilayah ini. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan menjalankan berbagai program seperti Banten mandiri pangan, program bantuan benih, pelatihan petani milenial, hingga pemberian alat mesin pertanian (alsintan). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan mendorong kemandirian desa dalam pengelolaan sumber daya pertanian.⁹

Desa Sorongan merupakan salah satu wilayah yang mengalami tantangan seperti minimnya teknologi, keterbatasan modal, dan rendahnya

⁶ Sinollah, dkk, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Perkarangan Rumah", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Tepis Wiring* Vol. 1 No. 1, 2022, h. 2.

⁷ Badan Pusat Statistik, "Provinsi Banten Dalam Angka 2023", BPS Provinsi Banten, <https://banten.bps.go.id/publication/2023/02/28/482ee839483674dd96faf/provinsi-banten-dalam-angka-2023.html>

⁸ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023", BPS Kabupaten Pandeglang, <https://pandeglangkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/16795717bee89f3ea730dc1b/kabupaten-pandeglang-dalam-angka-2023.html>

⁹ <https://disketapang.bantenprov.go.id/LKIP%202023>

produktivitas. Secara geografis, desa ini memiliki lahan yang luas dengan karakteristik tanah yang subur, yang menjadikannya sangat potensial untuk berbagai kegiatan pertanian. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Keberlimpahan sumber daya alam yang ada menjadi salah satu modal utama bagi masyarakat desa dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal.

Potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya akses terhadap teknologi modern, keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya, serta minimnya pendampingan dari lembaga terkait seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peran lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat meningkatkan kapasitas mereka, baik dalam aspek teknis pertanian, pengelolaan hasil panen, hingga produk secara lebih luas. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Lazharfa) hadir dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian di Desa Sorongan. Program ini mencakup berbagai bentuk pendampingan, seperti pelatihan teknis, penyediaan bibit unggul, dan pengelolaan hasil panen. Lazharfa bertujuan untuk membentuk petani meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.

Pelaksanaan program pendampingan ini membutuhkan evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah program telah berjalan sesuai dengan rencana awal dan mencapai target yang diharapkan, dan mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin terjadi baik dari sisi teknis, ketersediaan sumber daya, maupun keterlibatan pihak yang terlibat. Evaluasi ini juga menjadi peluang untuk menggali kelebihan dan kelemahan dari program yang telah dilaksanakan, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program pertanian yang dijalankan oleh Lazharfa di Desa Sorongan telah berjalan dengan baik serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat

setempat. Dari paparan tersebut, penulis mengambil judul **“Evaluasi Program Pendampingan Pertanian Padi Oleh Lazharfa Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program pendampingan pertanian padi oleh Lazharfa di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?
2. Apa dampak program pendampingan pertanian padi oleh Lazharfa di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana evaluasi program pendampingan pertanian padi oleh Lazharfa di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang berdasarkan model evaluasi CIPP?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi program pendampingan pertanian padi oleh Lazharfa di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.
2. Mengetahui dampak program pendampingan pertanian padi yang dilakukan oleh Lazharfa di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.
3. Mengetahui hasil evaluasi program pendampingan pertanian padi oleh Lazharfa di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang berdasarkan model evaluasi CIPP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Harapannya, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca tentang Evaluasi Program Pendampingan Pertanian Padi Oleh Lazharfa Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penyusunan skripsi, dapat memberikan pengalaman dalam berpikir secara ilmiah, sehingga dapat memperluas pemahaman dan wawasan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pembacanya serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian dapat memberikan masukan kepada lembaga Lazharfa selaku pelaksana program Pendampingan Pertanian Padi di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten pandeglang agar dapat meningkatkan dan mengembangkan program kegiatan yang sudah berjalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam memandirikan masyarakat.

c. Bagi akademisi

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam pengembangan karya ilmiah oleh para akademisi, baik di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun di luar lembaga tersebut.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti juga merujuk pada literatur penelitian sebelumnya. Selain untuk referensi, pencarian literatur ini juga berfungsi untuk mencegah kemiripan dengan penelitian yang dilakukan atau plagiarisme. Beberapa penelitian yang menjadi rujukan meliputi:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cindri A. Halid, Supriyono Imran, dan Larasati Sukmadewi Wibowo (2024) berjudul “Evaluasi Program Penyuluhan Sistem Tanam Padi Jajar Legowo Terhadap Produksi dan Pendapatan di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango”

merupakan penelitian yang relevan sebagai pembanding dalam penelitian ini. Penelitian tersebut bertujuan mengevaluasi efektivitas program penyuluhan sistem tanam padi jajar legowo dan menganalisis produksi serta pendapatan petani sebelum dan sesudah mengikuti program. Metode penelitian yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan kuesioner dengan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana terhadap 32 petani sebagai responden. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk menilai kesesuaian program dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyuluhan berhasil meningkatkan hasil panen dari 37.770 kg menjadi 39.865 kg dan pendapatan petani dari Rp9.547.078 menjadi Rp10.171.063. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus terhadap evaluasi program di bidang pertanian padi, penggunaan model evaluasi CIPP, serta tujuan untuk mengukur dampak program terhadap petani. Namun, terdapat pula perbedaan dari segi pendekatan dan pelaksana program. Penelitian Halid dkk menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada penyuluhan teknis oleh pemerintah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengevaluasi program pendampingan pertanian berbasis pemberdayaan oleh lembaga sosial (Lazharfa). Perbedaan ini memperkaya referensi, karena dapat menunjukkan perbandingan antara pendekatan teknis dan sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Sawerah, Novira Kusriani, dan Adi Suyatno (2024) berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada Usaha Tani Padi di Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak” merupakan studi yang relevan untuk dijadikan pembanding dalam penelitian ini. Penelitian

¹⁰ Cindri A. Halid, dkk, “Evaluasi Program Penyuluhan Sistem Tanam Padi Jajar Legowo Terhadap Produksi dan Pendapatan di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango”, *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* Vol. 8, No. 1, 2024, h.139-153.

tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani padi melalui mekanisme penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan. Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Product*), yang juga digunakan dalam skripsi ini. Metode penelitian dilakukan secara survei dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap petani yang mengikuti program, dan data dikumpulkan melalui wawancara serta observasi, kemudian dianalisis menggunakan metode scoring dan tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PUAP memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi, keterampilan petani, serta pengelolaan usaha tani secara menyeluruh. Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokusnya terhadap evaluasi program pendampingan pertanian padi, penggunaan model evaluasi CIPP, serta tujuan untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, terdapat perbedaan dari segi pendekatan dan bentuk pelaksana program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada program pemerintah (PUAP) di wilayah Kalimantan Barat, sementara skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi program pemberdayaan pertanian oleh lembaga non-pemerintah (Lazharfa) di wilayah Provinsi Banten. Perbedaan ini memberikan sudut pandang yang melengkapi, khususnya dalam melihat efektivitas program pendampingan dari sisi pelaksana yang berbeda dan pendekatan evaluatif yang lebih mendalam secara naratif.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Andepi, I Nyoman Sujana, dan Made ary Meitriana tahun 2020 yang berjudul “Evaluasi Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas program Simantri di Desa Mengani, Kecamatan

¹¹ Siti Sawerah, dkk, “Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Pada Usaha Tani Padi di Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak” *Jurnal Sains Pertanian Equator* Vol. 1, No. 1, 2024, h. 1-10.

Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Metode yang digunakan adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi terhadap 39 anggota kelompok Simantri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari empat dimensi (*context, process, dan product*) berada dalam kategori efektif, sementara dimensi *input* dikategorikan kurang efektif karena ditemukan berbagai kendala seperti minimnya partisipasi anggota, kurangnya sarana prasarana, dan penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan awal. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, di antaranya sama-sama menggunakan model evaluasi CIPP untuk mengkaji efektivitas program, sama-sama berfokus pada bidang pertanian yang melibatkan kelompok tani, serta menilai pelaksanaan program berdasarkan keterlibatan masyarakat dan hasil yang dicapai. Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada pendekatannya, di mana penelitian Simantri menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, lembaga pelaksana program juga berbeda: penelitian Simantri mengevaluasi program milik pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini menilai program yang dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat, yaitu Lazharfa. Perbedaan konteks kelembagaan ini memberikan sudut pandang yang saling melengkapi dalam memahami dinamika pendampingan dan pemberdayaan petani di berbagai wilayah dan jenis institusi pelaksana program.¹²

¹² Ni Putu Andepi Dewi, dkk, "Evaluasi Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri)", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Vol. 12, No. 1, 2020, h.107-116.

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation*, yang berarti usaha untuk menilai atau menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.¹³ Tujuan evaluasi adalah memberikan informasi mengenai kualitas proses dan hasil suatu kegiatan, apakah baik atau buruk. Dibandingkan dengan penilaian, evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas, sementara penilaian hanya berfokus pada aspek tertentu yang menjadi bagian dari evaluasi itu sendiri.¹⁴

Secara terminologi, banyak ahli memberikan definisi tentang evaluasi. Salah satunya, M. Chabib Thoha menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk memahami kondisi suatu objek. Proses ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur tertentu, dan hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan guna memperoleh kesimpulan.¹⁵

Evaluasi berfungsi untuk membantu pelaksana program memahami sejauh mana hasil yang telah dicapai secara nyata. Melalui proses ini dapat diketahui apakah capaian program melebihi target yang telah ditetapkan, sesuai dengan standar yang diharapkan, atau justru belum mencapai sasaran. Secara umum, evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai secara objektif tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Temuan dari evaluasi tersebut kemudian menjadi bahan masukan

¹³ Endang Sutisna, *Evaluasi Program Tahfiz Al-qur'an*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 7.

¹⁴ Abd. Wahib, "Manajemen Evaluasi Program Supervisi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Auladuna* Vol. 3, No. 1, 2021, h. 92-93.

¹⁵ Ismail Marzuki, "Implementasi Prinsip-Prinsip Evaluasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Tadarus Tarbawy* Vol. 6, No. 1, 2024, h. 92.

atau umpan balik dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program berikutnya agar lebih efektif di masa mendatang.¹⁶

Menurut Djaali dan Muljono dalam Asyraf Suryadin et al, evaluasi merupakan sebuah proses untuk menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan terkait objek yang dinilai. Sedangkan menurut Cross, evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa evaluasi berfungsi untuk menilai kondisi pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan evaluasi yang baik, diperlukan langkah pengukuran dan penilaian yang tepat.¹⁷

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019, evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana serta standar yang telah ditetapkan. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu program atau kebijakan dalam mencapai target yang diharapkan.¹⁸ Proses evaluasi ini mencakup pengumpulan data, analisis, serta penyusunan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan atau pengambilan keputusan selanjutnya. Dengan adanya evaluasi, pemerintah atau lembaga terkait dapat mengidentifikasi hambatan, kekurangan, serta potensi pengembangan agar pelaksanaan suatu program dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.¹⁹

¹⁶ Ade Hamim, dkk, "Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Lifelong Education*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 28.

¹⁷ Asyraf Suryadin, dkk, "*Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, And Product) Antara Teori dan Praktiknya*", (DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), h. 3-4.

¹⁸ <https://kamus-hukum.com/definisi/3622/Evaluasi>

¹⁹ Muhammad Ibnu, "Evaluasi Dampak Program Intervensi di Sektor Pertanian", *Jurnal Agribisnis Lahan Kering* Vol. 7, No. 3, 2022, h. 102.

b. Tujuan Evaluasi

Program evaluasi dirancang dengan tujuan tertentu yang jelas yaitu untuk menilai sejauh mana sebuah kegiatan, proyek, atau inisiatif telah mencapai hasil yang diharapkan, memahami efektivitasnya, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk pengembangan di masa depan.

Purwanto dan Suparman memaparkan tujuan dari evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Mengkomunikasikan Program Kepada Masyarakat

Evaluasi memungkinkan masyarakat memahami program yang dijalankan, termasuk kinerjanya. Dengan menyampaikan hasil evaluasi secara rinci, bukan sekadar angka-angka, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Hal ini memberikan manfaat besar bagi program tersebut, seperti meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik.

2. Menyediakan Informasi Bagi Pembuat Keputusan

Hasil evaluasi memberikan data yang diperlukan dalam berbagai tahap pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, atau saat memutuskan apakah program akan dilanjutkan atau diulang. Informasi dari evaluasi ini menjadi dasar yang lebih valid dalam pengambilan keputusan, dibandingkan jika hanya mengandalkan intuisi. Selain itu, informasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pejabat di lembaga tersebut, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang terlibat di berbagai level pengambilan keputusan.

3. Menyempurnakan Program yang Ada

Melalui evaluasi yang dilakukan secara sistematis, berbagai kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi. Selanjutnya, alternatif solusi yang paling tepat dapat ditemukan. Evaluasi juga membantu memahami dampak program secara keseluruhan, sehingga memungkinkan penyempurnaan komponen-komponen yang kurang efektif. Dengan begitu, program dapat berjalan lebih optimal dan mencapai hasil yang lebih baik.

4. Meningkatkan Partisipasi dan Pertumbuhan

Hasil evaluasi program yang disampaikan kepada masyarakat dapat mendorong keterlibatan aktif mereka dalam mendukung peningkatan dan penyempurnaan program tersebut. Ketika masyarakat memahami hasil evaluasi, mereka cenderung lebih peduli, tertarik, dan akhirnya merasa memiliki program itu. Partisipasi ini menciptakan kontrol eksternal yang tidak hanya memotivasi, tetapi juga membantu mengawasi perkembangan kualitas program, sehingga pertumbuhan dan perbaikannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.²⁰

c. Model Evaluasi

Model evaluasi adalah penerapan konsep atau teori evaluasi dalam bentuk nyata saat melaksanakan kegiatan evaluasi suatu program. Model ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis sehingga proses evaluasi dapat dilakukan dengan lebih terarah dan bermakna. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu program. Setiap model memiliki pendekatan dan karakteristiknya sendiri, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan evaluasi yang hendak dicapai.

Salah satu model evaluasi yang cukup dikenal adalah model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Stufflebeam pada tahun 1966. Menurut Stufflebeam dalam Esti Wahyu Kurniawati, model ini dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi salah satu kerangka evaluasi yang komprehensif. Model ini mengklasifikasikan ke dalam empat cakupan utama, yaitu konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*). Model ini dikenal dengan sebutan model CIPP.²¹ Berikut ini adalah jenis-jenis yang dijelaskan oleh Stufflebeam:

²⁰ Asyraf Suryadin, dkk, “Evaluasi Program Model CIPP”..., h. 11-12.

²¹ Esti Wahyu Kurniawati, “Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model Cipp (*Context, Input, Process, Product*)”, *Jurnal GHAITSA : Islamic Education Journal* Vol. 2, No. 1, 2021, h. 22.

1. Evaluasi *context*, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan yang melatarbelakangi penyusunan suatu program. Fokus utama evaluasi ini adalah mengungkap kekuatan dan kelemahan organisasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Secara garis besar, tujuan evaluasi konteks meliputi penilaian kondisi organisasi secara menyeluruh, pengenalan kelemahan yang perlu diperbaiki, pendataan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan, diagnosis masalah yang dihadapi, dan pencarian solusi. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan menilai apakah tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan kebutuhan para pihak yang menjadi targetnya.
2. Evaluasi *input*, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, aset, dan peluang yang dapat membantu pengambil keputusan dalam mendefinisikan tujuan dan prioritas. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi untuk melibatkan kelompok pengguna dalam menilai tujuan, prioritas, dan manfaat suatu program, serta menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, staf, dan anggaran guna memastikan kelayakan dan potensi program dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan. Tujuan utama evaluasi input adalah membantu menentukan program yang dapat membawa perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi ini juga berfokus pada pencarian hambatan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Secara keseluruhan, evaluasi input membantu klien dalam menilai berbagai alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran organisasi, serta menghindari inovasi yang tidak efektif atau berisiko gagal, yang dapat menghabiskan sumber daya secara percuma.
3. Evaluasi *process*, berfokus pada penilaian pelaksanaan rencana untuk membantu staf program dalam menginterpretasikan manfaat yang diperoleh. Evaluasi ini dapat mencakup peninjauan kembali rencana organisasi dan evaluasi sebelumnya untuk mengidentifikasi aspek-aspek

penting yang perlu dimonitor. Penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari evaluasi proses adalah memastikan kelancaran proses itu sendiri. Jika terdapat penyimpangan dari rencana awal, evaluasi ini akan menjelaskan penyebabnya. Fungsi utama evaluasi proses adalah memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi untuk menjalankan program sesuai dengan rencana atau memodifikasi rencana yang terbukti tidak efektif. Dengan demikian, evaluasi proses menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk menafsirkan hasil evaluasi produk.

4. Evaluasi *product*, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil serta manfaat yang diperoleh, baik yang sudah direncanakan maupun yang tidak direncanakan, dalam jangka pendek maupun panjang. Secara lebih rinci, evaluasi ini berfokus pada penilaian keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan sasaran program. Penilaian keberhasilan atau kegagalan program dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat, baik secara individu maupun kolektif, dan kemudian dianalisis. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai perspektif yang ada.²²

2. Pendampingan Masyarakat

Pendampingan masyarakat merupakan proses pendampingan sosial yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk membantu kelompok masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang mereka hadapi. Pendamping memiliki peran sebagai fasilitator, motivator, dan penghubung antara masyarakat dengan sumber daya yang lebih luas. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya secara berkelanjutan.²³ Pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknis seperti pelatihan, tetapi juga mencakup penguatan

²² Esti Wahyu Kurniawati, "Evaluasi Program Pendidikan"..., h. 22-23.

²³ Serafin Wisni Septiarti, dkk, *Pendampingan Masyarakat*, (Madiun:Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), h. 20.

kapasitas, kesadaran kritis, serta advokasi terhadap hak-hak masyarakat.²⁴ Pendampingan masyarakat merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara intensif dan melibatkan partisipasi aktif, dengan tujuan untuk mendorong tercapainya kemandirian pada suatu komunitas atau kelompok.²⁵

Peran pendamping sangat penting dalam membantu individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, disabilitas, keterlantaran, atau ketidakmampuan dalam mengakses layanan dasar. Selain itu, pendamping juga berperan dalam membantu masyarakat memahami kebijakan sosial yang berlaku serta mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan adanya pendampingan sosial yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, diharapkan individu atau kelompok yang mengalami keterbatasan dapat mencapai kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.²⁶

Pendamping dalam konteks pendampingan masyarakat berperan sebagai sosok yang memiliki pengalaman dan keahlian untuk membimbing serta mendukung perkembangan individu secara berkelanjutan. Peran ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan teknis atau solusi sesaat, tetapi juga mencakup aspek pembentukan karakter, pemberian motivasi, serta pengembangan keterampilan sosial dan kehidupan. Hubungan antara pendamping dan masyarakat yang didampingi bersifat jangka panjang, dilandasi oleh kepercayaan, empati dan komitmen bersama untuk mencapai perubahan yang positif. Dalam konteks pendampingan masyarakat, prinsip mentoring ini tercermin dalam bagaimana pendamping sosial mendampingi

²⁴ M. Ridwan, dkk, *Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2024), h. 211

²⁵ Ismail Suardi Wekke, *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan Ke Publikasi*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), h. 68.

²⁶ Zulkarnain, dkk, *Pemberdayaan Wirausaha Santri Pondok Pesantren Sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat*, (Madiun: CV Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), h. 15.

individu atau kelompok yang mengalami keterbatasan. Pendamping tidak hanya memberikan informasi atau bantuan sesaat, melainkan juga mendorong proses belajar, refleksi, dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan, dan mendorong tercapainya kemandirian serta kesejahteraan yang berkelanjutan.²⁷

Pendampingan masyarakat biasanya melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pelatihan dan advokasi. Pelatihan bertujuan untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mereka, sekaligus mengembangkan keterampilan keluarga agar mampu menghadapi berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, advokasi adalah wujud keberpihakan pendamping terhadap masyarakat, yang mengalami ketimpangan atau kesulitan, dilakukan melalui berbagai tindakan politis yang terstruktur untuk mengubah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam komunitas tersebut.²⁸

Menurut Anwar Muttaqin et al ada lima aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pendampingan sosial, terutama melalui pelatihan dan advokasi untuk masyarakat:

- a. Motivasi, masyarakat didorong untuk memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial, dan kekuasaan, dengan menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Keterampilan, kesadaran dan kemampuan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan dasar. Sementara itu, keterampilan vokasional dikembangkan secara

²⁷ Hendi Sastra Putra, "Peranan Rumah Singgah Dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar di Kota Bengkulu", *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 5, No. 2, 2020, h. 25.

²⁸ Anwar Muttaqin, dkk, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Kewirausahaan", *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 5, No. 3, 2020, h. 333.

partisipatif, menggabungkan pengetahuan lokal dengan wawasan dari luar.

- c. Manajemen Diri, kelompok masyarakat perlu mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengelola kegiatan secara mandiri, seperti mengadakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, menyelesaikan konflik, dan mengatur kepemilikan bersama.
- d. Mobilisasi Sumber, mengumpulkan sumber daya individu, misalnya melalui tabungan rutin dan sumbangan sukarela, dengan tujuan membangun modal sosial yang dapat dimanfaatkan bersama.
- e. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan, kelompok masyarakat perlu memperkuat kemampuan anggotanya untuk membangun dan menjaga jaringan dengan sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini penting untuk membuka akses terhadap sumber daya dan peluang, demi meningkatkan keberdayaan masyarakat, khususnya yang kurang mampu.²⁹

Pendampingan berperan sebagai agen perubahan yang aktif membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan. Keberhasilan seorang pendamping sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang tujuan dan fungsi dari proses pendampingan itu sendiri. Anwar Muttaqin et al dalam penelitiannya menyebutkan pendampingan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Penguatan (*empowerment*)

Pendamping bertugas untuk menguatkan masyarakat agar dapat kembali ke keadaan semula atau lebih baik.

- b. Pembimbing (*Guiding*)

Pendamping berperan sebagai pembimbing dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan.

²⁹ Anwar Muttaqin, dkk, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat"...h. 333.

- c. Penopang (*Sustaining*)
Pendamping mendukung masyarakat agar mampu berdiri sendiri dalam situasi baru, sehingga dapat bertumbuh secara penuh dan utuh.
- d. Memperbaiki Hubungan (*Reconciling*)
Pendamping berperan dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat dampingan.
- e. Pembebasan (*Liberating, Capacity Building*)
Pendamping bertujuan membebaskan masyarakat dari keterbatasan dan memperkuat kapasitas mereka demi keberlanjutan kehidupan yang lebih baik.³⁰

3. Pertanian Padi

Kata pertanian berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *ager* yang berarti lapangan dan *colo* yang berarti mengolah. Jika digabungkan menjadi *agricultura*, yang bermakna pengolahan tanah atau kegiatan di ladang. Secara lebih luas, pertanian mencakup berbagai aktivitas seperti budidaya tanaman, domestikasi hewan, hortikultura, arborikultura, dan vegekultur. Selain itu, juga meliputi pengelolaan ternak melalui sistem seperti pertanian campuran tanaman-ternak, pastoralisme, hingga *transhumance*.³¹

Padi (*Oryza Sativa L.*) merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia, khususnya di Indonesia. Sebagai sumber bahan pangan utama bagi hampir setengah penduduk dunia, padi menjadi komoditas vital yang mendukung kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai tanaman padi tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai makanan pokok, tetapi juga mencakup aspek spiritual, budaya, ekonomi, dan politik yang mendalam karena erat kaitannya dengan tradisi serta kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pertanian padi sebagai sistem budidaya tanaman

³⁰ Anwar Muttaqin, dkk, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat"...h. 334.

³¹ Victor Bintang Panunggul, dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), h. 2-3.

padi memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Kegiatan pertanian padi melibatkan berbagai tahapan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan petani dan stabilitas pangan nasional.³²

Hingga kini telah ditemukan sekitar 23 spesies padi di alam, namun hanya dua jenis yang dapat dikonsumsi dan dibudidayakan, yaitu *Oryza sativa* dan *Oryza glaberrima*. Tanaman padi tergolong dalam keluarga *Poaceae* atau suku padi-padian. Padi merupakan tanaman terna semusim yang memiliki akar serabut serta batang yang relatif pendek.³³

Secara umum, pertanian padi merupakan bagian dari aktivitas pertanian yang mencakup proses bercocok tanam tanaman pangan, khususnya padi sebagai komoditas utama. Kegiatan ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pascapanen. Berbeda dengan pengertian pertanian secara luas yang juga mencakup peternakan, perikanan, dan kehutanan, pertanian padi berfokus pada budidaya tanaman padi yang menjadi sumber pangan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam praktiknya pertanian padi sering kali masih melibatkan bantuan tenaga kerja manusia dan hewan, terutama di wilayah pedesaan, untuk mendukung proses produksi secara tradisional maupun semi-modern. Kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di tingkat lokal maupun nasional.³⁴

Pertanian padi merupakan salah satu sektor penting dalam sistem ketahanan pangan di Indonesia, mengingat beras adalah makanan pokok

³² Ardian, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Panen Padi *Oryza Sativa L*", *Jurnal Of Geographical Sciences And Education*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 19.

³³ A. Syamad Ramayana, dkk, *Buku Referensi Padi Ladang spesifik Wilayah Tropika Basah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Manegement, 2024), h. 5-6.

³⁴ Pardin Lasaksi, "Analisis Peran Sektor Pemerintahan Terhadap Perekonomian", *Jurnal Lentera: Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 3, 2023, h. 167-168.

mayoritas penduduk. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki beragam kondisi geografis dan iklim yang memengaruhi praktik budidaya padi di berbagai daerah. Oleh karena itu, sistem pertanian padi di Indonesia tidak bersifat seragam, melainkan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik lahan dan sistem budidayanya. Secara umum, jenis-jenis padi yang dibudidayakan meliputi padi sawah (irigasi), padi gogo (ladang), dan padi rawa. Masing-masing jenis memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi teknik pengelolaan, kondisi lingkungan tumbuh, hingga tantangan yang dihadapi dalam proses budidayanya.

Salah satu jenis yang paling umum dibudidayakan di Indonesia adalah padi sawah. Padi sawah ditanam pada lahan basah yang diairi secara terkontrol dengan menggunakan sistem irigasi, sehingga kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara optimal sepanjang masa pertumbuhan. Pengairan yang teratur ini memungkinkan tanaman padi tumbuh dengan baik dan mengurangi risiko kekeringan, sehingga produksi padi sawah cenderung lebih tinggi dibandingkan jenis padi lainnya. Selain itu, budidaya padi sawah juga memerlukan pengelolaan air yang cermat dan pengendalian hama yang efektif untuk menjaga kesehatan tanaman dan meningkatkan hasil panen secara maksimal. Pengelolaan meliputi pemantauan kondisi lahan dan penerapan teknik pertanian yang sesuai guna mencegah kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit.³⁵

Berbeda dengan padi sawah, padi gogo dibudidayakan di lahan kering yang tidak memiliki sistem pengairan terkontrol. Varietas unggul padi gogo memiliki potensi hasil yang cukup tinggi apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik. Selain itu, padi gogo sering dikombinasikan dengan sistem tanam legowo atau tumpang sari, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi

³⁵ Joko Pramono, dkk, "Peningkatan Produktivitas Melalui Perbaikan Sistem Budidaya Padi Sawah di Tengah Ancaman Perubahan Iklim", *Jurnal Kaliagri*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 10.

penggunaan lahan tetapi juga membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko serangan hama serta penyakit.³⁶

Selain padi sawah dan padi gogo, jenis padi lainnya yang juga banyak ditemui di Indonesia adalah padi rawa. Padi rawa, tumbuh di lahan dengan genangan air dangkal yang bersifat musiman atau permanen, serta memiliki kondisi tanah berlumpur dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Kondisi lingkungan ini memberikan keunikan tersendiri bagi budidaya padi rawa, karena tanaman harus mampu beradaptasi dengan kondisi air yang fluktuatif. Namun, padi rawa menghadapi berbagai tantangan seperti cekaman air yang berlebihan dan serangan hama yang cukup serius sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih intensif dan teknik budidaya khusus agar hasil panen dapat maksimal dan berkelanjutan.³⁷ Dengan memahami karakteristik masing-masing jenis pertanian padi ini, pengelolaan yang tepat dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian padi di Indonesia.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang penting dalam pembangunan berbasis komunitas. Menurut Suharto dalam Agus Triyono et al pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mandiri, memiliki kekuasaan, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi, dan sosial.³⁸

Menurut *World Bank*, pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mereka mampu bernegosiasi, memengaruhi, mengendalikan, dan mengawasi lembaga-lembaga yang berperan dalam hidup mereka. Sementara itu, Jim Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memberikan sumber daya, peluang, pengetahuan,

³⁶ Eries Dyah Mustikarini, dkk, "Potensi Galur Padi Gogo di Lahan Kering Pulau Belitung", *Jurnal Penelitian Agronomi*, Vol. 26, No. 2, 2024, h. 86.

³⁷ Yogi Ananda Kristiawan, dkk, "Analisis Usaha Tani Padi Lahan Persawahan dan Lahan Rawa di Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Jawa Tengah", *Proceedings Series On Physical And Formal Sciences*, Vol.8, 2025, h. 106.

³⁸ Agus Triyono, dkk, "*Komunikasi, Media dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi*", (Yogyakarta: APMD Press, 2021), h. 193.

dan keterampilan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.³⁹

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola serta menentukan arah kehidupannya sendiri. Gagasan ini berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang bernilai untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemberdayaan menjadi perhatian penting bagi pemerintah maupun organisasi internasional dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.⁴⁰

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menggali potensi diri, kreativitas, kemampuan berfikir, dan keterampilan agar terus berkembang lebih baik dari sebelumnya.⁴¹ Konsep pemberdayaan masyarakat, jika ditelusuri lebih dalam sebenarnya berasal dari pandangan yang memandang manusia sebagai subjek utama dalam kehidupannya sendiri. Pemberdayaan ini menekankan pentingnya kekuatan (*power*) dan keberpihakan kepada kelompok yang tidak memiliki daya.⁴²

Salah satu hal penting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah ketika program tersebut dirancang langsung oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mampu menjawab kebutuhan dasar mereka. Program juga perlu mendorong partisipasi kelompok miskin dan masyarakat yang terpinggirkan, memanfaatkan potensi serta sumber daya lokal, dan peka terhadap nilai-nilai

³⁹ Deni Sopiandah, dkk, "Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Mandiri Tbk Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karacak Leuwiliang Bogor)", *Jurnal Khidmat Sosial:Journal Of Social Work And Social Services*, Vol. 2, No. 1, 2021, h.10-11.

⁴⁰ Kadek Sri Ariyani, dkk, *Teori Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2025), h. 2.

⁴¹ Syarifah Gustiawati Mukri, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Pertanian Berbasis Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kewirausahaan", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, Vol. 9, No. 3, 2022, h. 718.

⁴² Nazarmanto, "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui pendidikan Non Formal", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 73.

budaya setempat. Selain itu, program harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan, menghindari terciptanya ketergantungan, melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, LSM, dan unsur lainnya, serta dijalankan secara berkelanjutan.⁴³

Menurut Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki 7 (tujuh) tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Tahap Persiapan (*Engagement*), pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: persiapan tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh fasilitator lapangan atau tenaga kerja sosial, dan kedua penyiapan lapangan yang lebih cenderung dilakukan secara tidak langsung.
- b. Tahap Pengkajian (*Assessment*), proses pengkajian bisa dilakukan secara individu maupun melalui kelompok masyarakat. Dalam proses ini, petugas perlu mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat (*feel needs*) serta memetakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendukung pemecahan masalah.
- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*Planning*), petugas sebagai agen perubahan bekerja secara partisipatif bersama warga untuk memahami masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat. Dalam proses ini, masyarakat diharapkan mampu merumuskan berbagai alternatif program kegiatan yang dapat dijalankan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- d. Tahap Rencana Aksi (*Action Plan Formulation*), pada tahap ini petugas mendampingi kelompok dalam merumuskan dan menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang tentang apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mereka juga membantu menyusun ide-ide tersebut, terutama saat diperlukan pembuatan proposal untuk diajukan kepada pihak pemberi dana.

⁴³ Suaib, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Indramayu: Cv Adanu Abimata, 2023), h. 5.

- e. Tahap Pelaksanaan (*Implementation*) Program atau Kegiatan, masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program yang telah dirancang. Pada tahap ini, kolaborasi antara petugas dan masyarakat sangat diperlukan, karena rencana yang tampaknya sudah matang sering kali perlu disesuaikan saat diimplementasikan di lapangan.
- f. Tahap Evaluasi (*Evaluation*), evaluasi program pemberdayaan masyarakat idealnya melibatkan warga sebagai bagian dari proses pengawasan. Partisipasi warga ini dapat menciptakan sistem pengawasan internal dalam jangka pendek, sekaligus memperkuat komunikasi di antara masyarakat dalam jangka panjang dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- g. Tahap Terminasi (*Termination*), tahap ini melibatkan penghentian hubungan formal dengan komunitas sasaran. Di tahap ini, diharapkan proyek dapat diselesaikan dan dihentikan segera setelah tujuan yang telah ditetapkan tercapai.⁴⁴

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menghasilkan data dalam bentuk narasi cerita, dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi dan banyak hal lain dari individu yang menjadi fokus penelitian.

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi bertujuan untuk memudahkan dan menjelaskan sasaran objek yang akan diteliti oleh penulis, dengan harapan meminimalisir perluasan masalah. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Waktu penelitian di mulai pada bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Juni 2025.

⁴⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 179-188.

2. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengamati langsung di lapangan. Data yang diperoleh dari observasi mencakup aspek seperti lokasi, pelaku, kegiatan, objek, tindakan, peristiwa, dan waktu.⁴⁵ Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi program pendampingan pertanian yang dijalankan oleh Lazharfa di Desa Sorongan. Observasi ini mencakup kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat dampingan, pelaksanaan pelatihan atau bimbingan dari pendamping, penggunaan sarana dan prasarana pertanian yang disediakan oleh program, serta interaksi antara pendamping dan petani. Data yang dicatat meliputi aktivitas harian, keterlibatan masyarakat, dan perkembangan pertanian yang terjadi selama program berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang melibatkan percakapan langsung (*face to face*) dengan cara mengajukan pertanyaan oleh peneliti kepada informan secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih rinci.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait yaitu:

⁴⁵ Ardiyansyah, dkk, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, No. 2, 2023, h. 4.

⁴⁶ Fenni Kurniawati Ardah, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya*, (Sukoharjo: Tahta Media, 2024), h. 61.

Tabel 1.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Informan	Jabatan/peran
1.	Ilham	Pendamping Lazharfa	Pelaksana program di lapangan
2.	Siti Khaerunnisa	Pegawai Kantor Lazharfa	Staff Program Development
3.	Ruslan	Petani	Peserta program
4.	Astim	Petani	Peserta program
5.	Kasmah	Petani	Peserta program
6.	Namo	Petani	Peserta Program
7.	Sunti	Petani	Peserta Program
8.	Miftauli Saputra	Aparat Desa	Kasi kesejahteraan Desa

(Sumber: Peneliti 2025)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen, arsip, atau materi tertulis lain serta gambar seperti foto, video, dan rekaman yang terkait dengan topik penelitian. Metode tersebut digunakan untuk menambahkan informasi yang didapat dari pengamatan dan interaksi wawancara.⁴⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendampingan pertanian oleh Lazharfa. Peneliti akan mengumpulkan foto kegiatan lapangan, seperti pelatihan, proses tanam, panen, atau distribusi bibit. Serta laporan data peserta program, dan materi pelatihan yang digunakan selama program berlangsung. Jika tersedia, video atau rekaman kegiatan juga akan digunakan sebagai data pendukung. Seluruh dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program lapangan.

⁴⁷ Ilham Kamarudin, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 68.

3. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang darimana dan bagaimana data tersebut diperoleh, terdapat dua jenis data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer merujuk pada informasi atau data yang diperoleh langsung di lapangan dan bersumber dari informan.⁴⁸ Jenis data ini bersifat asli karena belum mengalami pengolahan data sebelumnya. Data ini diperoleh melalui metode seperti observasi, wawancara, dan survei langsung. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan lapangan. Informan utama adalah petani penerima manfaat, pendamping lapangan dari Lazharfa, serta aparat Desa.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi atau data yang ditemukan melalui pencarian arsip dan berbagai koleksi perpustakaan termasuk buku-buku, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.⁴⁹ Data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen milik Lazharfa terkait program pendampingan pertanian, profil Desa dari kantor Desa Sorongan, laporan-laporan sebelumnya, serta literatur ilmiah dan jurnal yang relevan dengan evaluasi program.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menggabungkan dan menyaring data untuk memilih informasi yang benar-benar penting dan relevan, serta menghilangkan data yang tidak dibutuhkan. Tujuan utama reduksi data adalah untuk menyederhanakan, mengkategorikan, dan menata data agar peneliti lebih mudah

⁴⁸ Hikmatul Hidayah, "Pengertian, Sumber, dan Dasar Pendidikan Islam", *Jurnal As-Said*, Vol.3, No.1, 2023, h. 23.

⁴⁹ Nurul Melani Haifa, dkk "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam penelitian Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 263.

dalam membuat kesimpulan akhir.⁵⁰ Dalam praktiknya, peneliti mengidentifikasi informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian peneliti membuat rangkuman inti dari sejumlah data dan mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menata informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data penelitian dalam format yang mudah dipahami, seperti narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik, yang menggambarkan hubungan antarfenomena yang diteliti.⁵¹

c. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian dimulai sejak pengumpulan data di lapangan, dimana peneliti berupaya memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam data tersebut. Proses ini merupakan wujud hasil dari keseluruhan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian bertujuan untuk mengarahkan langkah-langkah selanjutnya, dan harus ditarik berdasarkan data yang terkumpul, bukan preferensi pribadi peneliti.⁵²

⁵⁰ Qomaruddin, dkk, "Kajian Teoritis Tentang Teknis Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman", *Journal Of Management, Accounting and Administration*, Vol. 1, No. 2, 2024, h. 81.

⁵¹ Sofwatillah, dkk, "Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam penelitian Ilmiah", *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 2, 2024, h. 80.

⁵² Rachmat Hidayat, dkk, "Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan data, Analisis Data dan Penyimpulan/Pemaknaan, dan Pelaporan dan Evaluasi Penelitian", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 6, 2025, h. 520.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat ditetapkan, diperlukan penyusunan struktur penulisan secara teratur. Penulis mengorganisasikannya ke dalam lima bab, yang masing-masing menekankan pada topik tertentu dengan spesifikasi pembahasan yang telah ditentukan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan profil lembaga LazHarfa. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni lokasi penelitian yang menjelaskan tentang letak geografis, kondisi demografi, kondisi pendidikan dan budaya, kondisi sosial keagamaan, kondisi ekonomi dan sumber daya, profil lembaga LazHarfa meliputi sejarah lembaga LazHarfa, Visi Misi, Susunan organisasi dan anggota, Program Lazharfa.

BAB III DAN BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan temuan lapangan mengenai evaluasi program pendampingan pertanian oleh LazHarfa di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan akhir yang dibuat peneliti dan ada saran-saran juga untuk mendukung dan berbagi berdasarkan pengalaman masing-masing di lapangan sehingga ada perbaikan untuk proses pengujian selanjutnya.